



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usulan Analisis Standar Belanja dari beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR
713

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.
Penata Tk. I
NIP. 198306042014041001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN
 KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	218.400
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	292.800
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Ruang Rawat Inap RSUD Tarempa Ukuran 25,5 m x 22,85 m	M2	7.566.085
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Bangunan Kesehatan	Pembangunan Ruang Operasi RSUD Palmatak 7,10 m x 6 m	M2	11.737.089
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Penimbunan Lapangan Silat Desa Bayat	Penimbunan (Timbunan Tanah)	M3	602.290
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Beserta Perabotnya SMPN (DAK)		M2/Tahun	7.327.507
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Bangunan Greenhouse	Baja Ringan/pipa galvanis, peralatan pengairan, Rak, atap transparan, inseknet, tinggi bangunan 3 meter	M2	1.700.000
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pemeliharaan Objek Wisata Batu Lepe Kec. Siantan	Pemeliharaan Objek Wisata Batu Lepe Kec. Siantan	M2	241.475
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Atap di Mangrove Desa Temburun	Pembangunan Atap di Mangrove Desa Temburun	M2	666.657
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Pos Jaga Objek Wisata Air Terjun Neraja Kec. Jemaja Timur	Pembangunan Pos Jaga Objek Wisata Air Terjun Neraja Kec. Jemaja Timur	M2	5.555.555
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pemeliharaan Pagar Plaza Kuliner di Mangrove Desa Temburun	Pemeliharaan Pagar Plaza Kuliner di Mangrove Desa Temburun	M	225.000
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pemeliharaan Objek Wisata Batu Tompak Tiga Kec. Siantan	Pengecetan, Elektrikal, Tiang	Paket	100.000.000
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Astaka STQ VIII Tingkat Kabupaten	Pembangunan Astaka STQ VIII Tingkat Kabupaten. Desa Mubur - Kecamatan Siantan Timur	M2	2.227.760
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Panggung Kesenian Kampung Melayu Desa Tarempa Barat Kec. Siantan	Pembangunan Panggung Kesenian	M2	3.703.517
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor di Kacabjari Tarempa (Tunda Bayar 2022)	Paket	63.253.592

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


 ABDUL HARIS